



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : BALAI BESAR POM BANDAR LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAMRONI
2. Jabatan : PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
3. NHK : 134092

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 714.700.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 407 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
4. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. Tanah Seluas 404 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 22.700.000
6. Tanah Seluas 181 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000
7. Tanah Seluas 469 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 186.400.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000
3. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 38.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	46.541.126
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	985.641.126
III. HUTANG	Rp.	120.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	865.641.126

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.